JAWA TENGAH

DOKMAN DJA

GUBERNUR Jateng Pranowo meninjau jalan Kali Gawe, khususnya di bawah iembatan tol yang sebelumnya menjadi pusat kemacetan akibat tergenang hingga 40 cm. Dalam beberapa hari, Kota Semarang dikepung banjir akibat tingginya intesitas hujan. Ganjar Pranowo menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, bukan hanya ketika banjir melanda Kota Semarang. (KR-Budiono)

Bidan Delima Ikuti Pembinaan Pelayanan

MAGELANG (KR) - Para bidan Delima di Kabupaten Magelang mengikuti pembinaan pelayanan mereka terhadap ibu dan anak di tengah pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Unit Pelaksana Bidan Delima (UPBD) Provinsi Jateng, bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jateng. Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan ini, berlangsung di Gedung IBI Kabupaten Magelang, diikuti 50 perwakilan dari 214 bidan delima di daerah ini. "Maksud dan tujuan pembinaan ini untuk meningkatkan pelayanan bidan di Kabupaten Magelang, khususnya bidan Delima dan meningkatkan kembali kemampuan dan kapasitas mereka dalam pelayanan kepada kesehatan ibu dan anak," kata Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Magelang, Sri Kuswanti, Senin (1/3). Hadir pada kegiatan itu Wakil Ketua II Pengurus Daerah IBU Jateng, Nawangsih, Ketua UPBD Provinsi Jateng SA Rintawati, dan petugas administrasi UPBD Jateng Yeni Sugiarti. Dalam rangkaian kegiatan itu, juga dilakukan kunjungan ke salah satu tempat Praktik Mandiri Bidan (PMB) Anis Aryanti di Mungkid oleh pihak UPBD Jateng dan PD IBI Jateng, didampingi pimpinan PC IBI Kabupaten Magelang.

"Kunjungan ini untuk menunjukkan bahwa bidan delima melaksanakan praktik mandiri sesuai standar. Kalau masih ada beberapa hal kekurangan, tetapi itu masih wajar. Secara umum pada bidan di Kabupaten Magelang melakukan praktik mandiri sudah sesuai standar," katanya.

Sri Kuswanti juga mengemukakan tentang permasalahan dihadapi bidan di daerah setempat dalam kaitan dengan regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan puskesmas badan layanan umum daerah (BLUD) yang mengakibatkan mereka tidak memiliki kesempatan menolong persalinan di tempat PMB.

Angin Kencang Tumbangkan Pepohonan

MAGELANG (KR) - Angin kencang bercampur hujan terjadi di beberapa lokasi di wilayah Magelang, Sabtu (27/2) sore. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ada pohon di beberapa lokasi yang tumbang. Bahkan ada juga yang sempat mengenai bagian bangunan rumah warga. Ini seperti yang terjadi di wilayah lereng Bukit Menoreh wilayah Borobudur Magelang, tepatnya di wilayah Dusun Pokoh Desa Giripurno Kecamatan Borobudur Magelang, Sabtu (27/2) petang sekitar pukul 18.00. Salah satu warga Borobudur Magelang Nur Fauzan kepada KR, Minggu (28/2), membenarkan Sabtu sore hingga malam hari hujan intensitas sedang terus mengguyur dengan disertai tiupan angin yang cukup lumayan. Sebuah pohon cengkeh yang memiliki diameter sekitar 15 Cm tumbang yang menimpa bagian atap rumah salah satu warga yang ada di dekatnya. Minggu pagi kemarin warga bersama relawan dan tim BPBD Kabupaten Magelang maupun lainnya melakukan kerja bakti, baik untuk memotongi dahan dan ranting pohon yang roboh serta membersihkannya.

Informasi lain yang diperoleh KR, Minggu (28/2) menyebutkan pohon tumbang juga terjadi di wilayah Kecamatan Dukun. Kejadian di Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Tumbangnya pohon ini juga sempat mengenai bentangan kabel jaringan listrik, dan sempat menutup akses jalan.

Perpustakaan Klaten Meraih Akreditasi B



Syahruna menunjukkan salah satu ruang arsip.

KLATEN (KR) - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Lembaga Akreditasi Nasional menetapkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten memperoleh Standart Nasional Perpustakaan kategori B, sebagai lembaga pelayanan publik terkait penyediaan fasilitas bacaan bagi masyarakat. Sertifikat akreditasi bernomor 0202/ LAP.PU/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tersebut ditandatangani Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Syahruna, menjelaskan penilaian akreditasi pelayanan perpustakaan ini pertama diikuti tahun 2020. Aspek penilaian meliputi regulasi, fasilitas, aspek anggaran termasuk inovasi. "Aspek dasar penilaian dari Lembaga Akreditasi Nasional adalah dari sisi regulasi, sarana prasana, sumber daya manusia yang berkualitas dan daya dukung pemangku kebijakan. Penilaian tinggi juga dilihat dari nilai inovasi dan jenis layanan yang dilakukan,î kata Syahruna,

Ditambahkan, dari sisi tata ruang baca terus terus dibenahi, agar suasana baca di Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten bisa lebih menarik dan nyaman. Termasuk layanan akses baca secara on line melalui aplikasi I-klaten yang bisa diunduh masyarakat melalui playstore. "Kami secara pereodik mengubah tata ruang baca. Pembaca agar selalu nyaman perlu diberikan suasana-suasana baru. Alat peraga edukatif, sarana ramah difabel sampai tata cahaya ruangan kami perhatikan," tambahnya.

DPRD Grobogan Lakukan Bimtek Penganggaran 2022



GROBOGAN (KR) - Setelah mengikuti Rakor dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan secara virtual beberapa hari lalu, DPRD Grobogan segera menindaklanjuti dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek). Tujuannya agar semua anggota DPRD setempat benar-benar bisa memahami tentang pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

"Nanti, acara Bimtek juga akan mengundang dari Kemendagri sebagai nara sumber. Sehingga setiap anggota bisa mendengar langsung tentang pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan APBD Grobogan 2022 melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)," ujar Ketua DPRD Grobogan, Agus Siswanto SSos, Senin (1/3). Dalam rakor secara virtual di ruang paripurna I DPRD beberapa hari lalu, selain Ketua dan anggota DPRD, hadir juga Sekda Grobogan Dr Ir HM Sumarsono MSi, Kepala Bappeda Anang Armunanto SSos MSi, dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wahyu Susetijono SH MM.

Rakor dibuka Direktur Perencanaan Penganggaran Pemerintah Daerah, antara lain menyebutkan bahwa Pokir DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD dari hasil rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokir antara lain memuat tentang pandangan dan pertimbangan mengenai arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program atau kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

Tentang langkah yang perlu dilakukan, pertama, inventarisasi jenis program atau kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam rumusan SKPD. Kedua, kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program atau kegiatan hasil penelaahan tersebut. Ketiga, indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan, keempat yaitu lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berasal daeri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas, dan kelima, rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD,

Dalam kesempatan itu juga disampaikan cara penyampaian Pokir DPRD melalui SIPD. Sistem ini membentuk pola hubungan baru yang diwujudkan dalam cara baru dalam mengisi anggaran DPRD dan Pemerintahan Daerah. Dalam sistem baru ini, jika pelaksanaan program terdapat perubahan, maka sistem ini menjadi jembatan untuk menyatukan cara pandang. Nantinya, untuk penginputan Pokir anggota dewan melalui SIPD ini akan langsung divalidasi oleh bagian Kesekretariatan DPRD. Kemudian usulan tersebut akan masuk ke Bappeda dengan rekomendasi mitra kerja dan langsung masuk ke OPD masing-masing dan akan langsung diveri-



Agus Siswanto SSos

UU DESA DAN PP NO 11 TAHUN 2021

Peran Kepala Desa dan Bumdes Dioptimalkan

MAGELANG (KR) - Undang- undang Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes, menegaskan peran kepala desa sebagai pemimpin di desa dan Bumdes sebagai penggerak ekonomi desa. Hal ini juga sejala dengan program Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal yang diimplementasikan melalui program Sustainable Development Goals (SDGs).

"Untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, maka percepatan pembangunan di desa menjadi prioritas. Untuk itu, Kepala Desa (Kades) harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa," kata Direktur Jenderal Pe-

ngembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kemendes PDTT, Harlina Sulistyorini, pada sosialisasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, di Joglo Ndeso, Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu (27/2). Menurut Harlina, melalui pro-

Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global, sudah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Maka pembangunan desa, menjadi prioritas untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. "SDGs berisi 17 Tuiuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Mari bersama-sama mendorong SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa, dan bisa terwujud sesuai dengan harapan, yang utamanya tujuan pembangunan nasional," ajaknya.

gram Sustainable Development

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa menambahkan dana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masvarakat.

Pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Majelis Profesor Unnes Serahkan Bantuan

melepas rombongan Majelis Profesor menyerahkan batuan kepada korban banjir di Kudus, Pati, Semarang dan Pekalongan. Rombongan dipimpin Ketua Majelis Prof Dr Mungin Eddy Wibowo MPd Kons, bersama Prof Suci Hatiningsih, Prof Ida Zulaikha, Prof Edi Cahyono, dan Prof Tri Joko.

"Alhamdulillah kepedulian warga Unnes untuk turut membantu masyarakat yang terkena banjir cukup tinggi, Hari Sabtu, Majelis thur Rokhman saat melepas rombongan, Sabtu (27/2). Ketua Majelis Profesor Prof Mungin Eddy Wibowo menyampaikan terima kasih atas partisipasi para profesor di Unnes yang turut membantu korban banjir. Bantuan yang diberikan berbentuk sembako yang sangat diperlukan bagi penerimanya.

Drs Agus Budi Satria selaku asisten pemerintahan dan Kesra didampingi Kepala BPBD Kabupaten Kudus Pak Budi Waluvo

Fathur Rokhman MHum Semarang," jelas Prof Fa- yang memberikan bantu- Pati menyampaikan teri- berikan bantuan. an kepada masyarakat Kudus. "Atas nama pemerintah daerah Kudus kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang bermanfaat bagi warga kami. Semoga bantuan dari Majelis Profesor Peduli dapat meringankan warga yang berdampak banjir dan longsor," ujar Drs Agus Budi.

Usai dari Kudus Rombongan Majelis Profesor menuju Pati. Dr Muhtar SIP MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra

SEMARANG (KR) - Profesor menyerahkan ke menyampaikan apresiasi Sekda Kabupaten Pati me- ma kasih atas perhatian Rektor Universitas Negeri Kudus dan Pati, Minggu ke atas kepedulian Majelis myampaikan atas nama secara langsung dari Ma-Semarang (Unnes) Prof Dr Pekalongan dan Wilayah Profesor Unnes Peduli pemerintah Kabupaten jelis Profesor untuk mem-



Prof Mungin Eddy Wibowo MPd Kons menyerahkan bantuan di Kudus.

Denpom Lanal Semarang Teladan Se-Indonesia

SEMARANG (KR) - Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang dinobatkan sebagai Denpom Lanal Teladan se-Indonesia. Tanda kehormatan berupa Bendera Kebanggaan Prestasi Teladan 2021 diserahkan KASAL Laksamana TNI Yudo Margono SE MM kepada Dandenpom Lanal Semarang Mayor POM Arianto disaksikan Danpuspomal Laksamana Muda TNI Dr Nazali Lempo SH MH MTr Opsla CHRMP saat peringatan HUT POMAL Ke-75 di Jakarta belum lama ini.

Dandenpom Lanal Semarang, Mayor POM Arianto dalam acara tasyakuran sekaligus peletakan batu pertama pembangunan musala Al Mulk di markas Denpom Lanal Semarang Jalan Kaligarang Semarang, Senin (1/3) mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Denpomal yang dipimpinnya menyisihkan 50 Denpomal seluruh Indonesia yang dinobatkan terbaik dan teladan.

"Kami baru tahu setelah KASAL memaparkan kenapa kami dinobatkan sebagai teladan, indikatornya ternyata paling cepat dalam mengungkap dan melimpahkan kasus ke Mahmil. Kami memang punya target paling lambat 1 Minggu proses selesai dan langsung bisa dilimpahkan," ungkap Dandenpom Lanal Semarang.



Denpom Lanal Semarang.

KR-Chandra AN Mayor POM Arianto (kiri) secara simbolik, menerima material untuk membangun musola dari mitra

Mimbar Legislatif



DPRD Minta Pelayanan Sosial Dimaksimalkan

DI Jawa Tengah banyak panti sosial untuk anak, lanjut usia, wanita, dan disabilitas. Dari sejumlah panti itu, DPRD Jawa Tengah melihat soal pelayanan masih harus ditingkatkan secara maksimal, sehingga para penghuni panti tersebut bisa merasa nyaman dan diperhatikan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, terkait dengan Bambang Kusriyanto program Bantuan Satu

Orang Satu Hari (SOSH)/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swasta. Selama ini DPRD kerap meninjau keberadaan panti sosial ke sejumlah daerah.

Dari hasil pantauan itu, ada beberapa panti yang butuh perhatian dari pemerintah agar pelayanan sosial dapat lebih optimal. Masyarakat sangat mengharapkan kehadiran pemerintah dalam penanganan sosial. Untuk itu, bagaimana anggaran bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ke-

Panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta secara tidak langsung telah ikut membantu pemerintah dalam melayanai



masyarakat yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang tua jompo dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah juga membantu panti asuhan dalam hal keuangan.

DPRD Jawa Tengah sangat mendukung adanya program sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada LKS mengenai standar pelayanan

minimal (SPM) dalam panti. Selain itu, juga soal pemahaman prosedur pemanfaatan bantuan subsidi permakanan SOSH. Data dinsos menyebutkan, pada 2020 telah dilakukan alokasi anggaran kepada penerima manfaat (PM), diantaranya untuk 19.450 PM anak di 479 panti swasta, 3.745 PM lanjut usia di 41 panti swasta, 519 PM disabilitas di 17 panti swasta, dan 4.602 PM di 56 panti milik pemerintah. (*)

(Disampaikan oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)